

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi keuangan organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Perusahaan menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pihak.

Menurut Bambang Riyanto (2012):

Penyajian laporan keuangan memberikan ikhtiar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca (*balance sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal pada saat tertentu, dan laporan laba rugi (*income statement*) yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu.

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan suatu entitas selama satu periode. Laporan keuangan membantu dalam membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebuah laporan keuangan yang ideal harus memenuhi karakteristik kualitatif dan dapat dipertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi pedoman bagi seluruh entitas dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karakteristik kualitatif merupakan ukuran normatif sebuah laporan keuangan yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif sebagaimana disebutkan didalam PP Nomor 24 Tahun 2005

dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Standar Akuntansi (PSAK) No. 1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan lampiran laporan keuangan tahunan. Agar laporan keuangan menguntungkan pemakainya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Namun, terdapat beberapa laporan keuangan yang tidak menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna untuk membuat keputusan keuangan. Terlalu banyak informasi yang tidak relevan dapat menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan informasi penting sulit dipahami.

Kota Palembang termasuk dalam Kota yang konsisten mendapati opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dalam hal tersebut bahwa pemerintah kota Palembang dalam mengelola keuangannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut ditampilkan tabel 1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang untuk tahun 2013-2021 mengenai opini yang disampaikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Palembang Tahun 2013-2021**

No	Tahun	Opini BPK
1	2013	WTP-DPP
2	2014	WTP
3	2015	WTP
4	2016	WTP
5	2017	WTP
6	2018	WTP
7	2019	WTP
8	2020	WTP
9	2021	WTP

Sumber : Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Palembang Tahun 2013-2021

**Keterangan:**

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa BPK menyampaikan opini kepada Kota Palembang ditahun 2013 mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) ini dikarenakan dalam keadaan tertentu seorang Auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Di tahun 2014-2021 konsisten mendapati opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ini dikarenakan laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material (bpk.go.id, 2023).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Masih belum ditemukan adanya Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah yang dapat menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara, yang sudah memiliki payung hukum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sejalan dengan pendapat Sriyadi (1991:36) bahwa pendirian perusahaan daerah sebagai badan usaha pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda), dan modalnya berasal dari sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan utama BUMD dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menghasilkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat. Dalam menjalankan operasinya, BUMD diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh para stakeholder, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan investor. Laporan keuangan yang baik dan akurat sangat penting untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, memudahkan pengambilan keputusan manajemen, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap BUMD.

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) merupakan salah satu Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang

memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum, operasional PDAM yang meliputi produksi, pengolahan dan pendistribusian air bersih ke pelanggan. PDAM Didirikan dengan tujuan untuk menyalurkan air minum untuk untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, memupuk pendapatan untuk biaya administrasi, perawatan dan perluasan sistem serta memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke pemerintah daerah berupa pembagian laba.

Selain opini atas Laporan Keuangan, untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD Kota Palembang tahun 2020, BPK mengungkapkan adanya permasalahan yang terjadi pada salah satu BUMD kota Palembang yaitu PDAM Tirta Musi. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Musi kurang diterima sebesar Rp31.405.653.944,60; dan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Musi belum ditetapkan statusnya sebesar Rp118.055.692.371,20; dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah-masalah dalam mewujudkan laporan keuangan badan usaha milik daerah pada pdam yang berkualitas pada pemerintahan Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang harus menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran atas kinerja yang bertanggung jawab dalam proses mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kendala-kendala yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan PDAM yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dijalankan dengan efektif dan efisien. Keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki sehingga kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pelaporan keuangan dapat menjadi

tantangan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kualitas laporan keuangan PDAM dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam pelaporan keuangan. Penelitian terhadap kualitas laporan keuangan PDAM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu akuntansi dan manajemen keuangan publik, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan.

Sumber daya dan sumber dana yang belum dikelola secara efektif dan efisien dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan yang menimbulkan kerugian karena pendapatan tidak bias menutup biaya operasional yang mengganggu pada sistem pelayanan. Sebagai badan usaha milik daerah, PDAM memerlukan pengendalian intern sebagaimana dibutuhkan dalam organisasi sektor publik maupun swasta yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan aktivitas kegiatan sehari-hari. Pengendalian intern dilakukan pihak manajemen organisasi ataupun perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas adalah penting untuk menjaga kredibilitas PDAM dan memastikan keberlangsungan operasionalnya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dihadapkan pada persoalan yang dilematis karena keberadaannya sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang diharapkan mampu selalu dapat berkontribusi besar memberikan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) yang didalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, Keandalan dalam Laporan Keuangan, Pengamanan aset Negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>,2023). Menurut Nurillah dan Muid (2014), Jika pemerintahan mempunyai sistem pengendalian yang kurang dan lemah, maka laporan keuangan yang disajikan tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK.

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya kompetensi sumber daya manusia. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki karena sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan pelaporan yang dibuat dan tidak kesesuaian laporan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang ikut mempengaruhi baik buruknya kualitas laporan keuangan adalah dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan memberikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan data-data transaksi yang dari tahun ke tahun semakin besar serta kualitas data yang kian semakin kompleks dan rumit dikarenakan semakin meningkatnya total volume penerimaan dan pengeluaran suatu entitas dari tahun ke tahun.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2019) dengan Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tirta Wening Kota Bandung. Hasilnya memperlihatkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Novitasari *et al.*, (2022) bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Yana *et al.*, (2020) juga menunjukkan hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Uan *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Nabila *et al.*, (2019) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut memperkuat temuan penelitian Alvin (2018) dan Emilda *et al.*, (2020) bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tirta Musi Kota Palembang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada butir 1.1, permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PDAM?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PDAM?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PDAM?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan PDAM?

## **1.3. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar penelitian ini terfokus pada pembahasan yang telah ditentukan sehingga tidak meluas dan menyimpang. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini dilakukan

pada Badan Milik Usaha Daerah Kota Palembang dengan objek penelitian pada Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Musi tahun 2023.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Musi Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Musi Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Musi Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Musi Kota Palembang.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis  
Sebagai sarana untuk dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di PDAM Tirta Musi Kota Palembang.
2. Bagi Perusahaan (Perusahaan Air Minum Daerah)  
Sebagai masukan dan gambaran dari penerapan pengendalian internal, Kompetensi Sumber Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada serta menjadi pertimbangan dalam hal meningkatkan kualitas pelaporan



keuangan Badan Usaha Milik Daerah di PDAM Tirta Musi Kota Palembang agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang akuntansi sektor publik.